



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - REVIU ke-4

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

TAHUN
2020 - 2024



Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmatNya sehingga Rencana Strategis Perubahan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung tahun 2020-2024 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Renstra PPS Bitung tahun 2020-2024 merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala PPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung tahun 2020-2024 mempunyai nilai yang sangat strategis karena merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PPS Bitung. Penyusunan Renstra Strategis (Renstra) Perubahan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung mengacu pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 8 Tahun 2020), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 57 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2020-2024.

Bitung, Februari 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung



DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iii</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. KONDISI UMUM	<i>1</i>
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	<i>2</i>
C. LINGKUNGAN STRATEGIS.....	<i>3</i>
<i>BAB II</i>	<i>5</i>
<i>VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS</i>	<i>5</i>
A. VISI PPS BITUNG.....	<i>5</i>
B. MISI PPS BITUNG	<i>5</i>
C. TUJUAN PPS BITUNG	<i>5</i>
D. SASARAN STRATEGIS PPS BITUNG	<i>6</i>
<i>BAB III</i>	<i>12</i>
<i>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</i>	<i>12</i>
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KKP	<i>12</i>
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPS BITUNG	<i>19</i>
C. KERANGKA REGULASI.....	<i>27</i>
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	<i>27</i>
Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran terdiri dari :	<i>29</i>
<i>BAB IV</i>	<i>31</i>
<i>INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</i>	<i>31</i>
A. TARGET KINERJA	<i>31</i>
B. KERANGKA PENDANAAN	<i>39</i>
<i>BAB V</i>	<i>40</i>
<i>PENUTUP</i>	<i>40</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Capaian pembangunan perikanan tangkap di PPS Bitung tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Pembangunan perikanan tangkap di PPS Bitung memiliki 2 sasaran strategis utama yakni 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; dan 2) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Realisasi NTN tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,74 per tahun. Nilai tukar nelayan di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 dimana tercatat sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB), dimana indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan.

Selama tahun 2019, NTN mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan nelayan. Indeks harga yang diterima nelayan (IT) mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga ikan mengalami peningkatan akibat perbaikan kualitas ikan yang diperjualbelikan. Sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan (IB) juga mengalami peningkatan sebesar 2,72 persen dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh nelayan lebih kecil dibandingkan biaya yang diterima oleh nelayan.

Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bitung

Realisasi volume produksi tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,06% per tahun. Pada tahun 2015 tercatat volume produksi perikanan tangkap di PPS Bitung sebesar 45.208,52 ton dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 48.893,90 ton. Kenaikan volume produksi perikanan tangkap di PPS Bitung disebabkan karena meningkatnya aktivitas penangkapan ikan rata-rata 8,94% pertahun, dimana pada tahun 2015 sebanyak 8.955 kali menjadi 13.964 kali pada tahun 2019.

Produksi perikanan tangkap di PPS Bitung terbesar berasal dari alat penangkap ikan purse seine sebesar 63,71%, pole and line sebesar 15,37%, hand line sebesar 13,01%, dan sisanya dari berbagai alat tangkap lainnya. Berdasarkan jenis ikan hasil tangkapan didominasi tuna, cakalang, dan tongkol (TCT).

Nilai Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bitung

Realisasi nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,60% pertahun. Nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung tahun 2015 sebesar Rp. 809.615.486.906,- menjadi sebesar Rp. 1.197.170.741.001,- pada tahun 2019. Kenaikan nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung disebabkan oleh naiknya produksi perikanan tangkap dan harga ikan. Jenis ikan tuna mempunyai kenaikan produksi rata-rata 17,36% pertahun dan merupakan bahan baku utama untuk produk ekspor sehingga mempunyai harga yang kompetitif.

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di PPS Bitung

Tarif Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) di PPS Bitung didasarkan pada PP 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian nilai PNBP di PPS Bitung periode 2015-2019 mengalami kenaikan rata-rata sebesar xx% pertahun. Capaian nilai PNBP di PPS Bitung tahun 2015 sebesar Rp. xxx dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi (Rp. Juta) 1.394. Sumber PNBP terbesar di PPS Bitung berasal dari pungutan jasa pas masuk dan jasa tambat labuh kapal.

Capaian kinerja PPS Bitung juga ditopang oleh pelaksanaan beberapa kegiatan pemenuhan sarana prasarana publik, pelayanan publik dan implementasi kebijakan perikanan tangkap. Pemenuhan sarana prasarana publik yang telah dilaksanakan PPS Bitung kurun waktu 2015-2019 antara lain pengembangan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Higienis dan Ruang pemantuan (Fishmon).

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

- **Kelimpahan stok SDI;** Pemberantasan *IUU Fishing*, intensifikasi alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya pro-environment lainnya telah berhasil meningkatkan stok sumber daya ikan dalam 5 tahun terakhir. Secara faktual, nelayan di beberapa lokasi pun

telah merasakan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan.

- **Instrumen pengelolaan perikanan berbasis WPP;** Sejauh ini seluruh kondisi prasyarat utama dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPP telah terpenuhi; mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah disusun, penetapan dan operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP), maupun penetapan mekanisme pengaturan lainnya.

Permasalahan

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- **Kapasitas nelayan;** Rendahnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta yang ramah lingkungan, dan rendahnya pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan
- **Kesejahteraan nelayan;** Belum terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga nelayan serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengelola keuangan dalam menghadapi kerentanan usaha penangkapan ikan terhadap perubahan lingkungan dan cuaca
- **Mindset masyarakat perikanan tangkap;** Usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan

C. LINGKUNGAN STRATEGIS

Pembangunan perikanan tangkap di PPS Bitung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman.

Faktor Kekuatan dan Kelemahan

1. PPS Bitung sebagai lokasi *eco fishing port*;
2. Sudah berstandar ISO 9001:2015 dan 14001:2015;

3. Zona inti minapolitan di Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kondisi sarana dan prasarana belum optimal;
5. Jumlah dan kompetensi SDM pelabuhan masih rendah;
6. Penerapan PSM belum maksimal;
7. Belum optimalnya koordinasi dan komitmen dengan instansi terkait dalam penerapan regulasi;

Faktor Peluang dan Ancaman

1. Potensi SDI yang masih tinggi dari WPP 715, 716, 717;
2. Terdapat kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung;
3. Permintaan ikan berkualitas meningkat;
4. Aktivitas penangkapan ikan yang tinggi;
5. Masih terjadinya praktek *IUU Fishing* terutama *unreported*;
6. Belum optimalnya pelaksanaan sistem SLIN;
7. Kompetensi SDM nelayan belum mempunyai daya saing sebagai ABK kapal perikanan
8. Armada kapal perikanan didominasi skala kecil atau < 30 GT;
9. Belum maksimalnya jaminan keselamatan profesi nelayan;
10. Penanganan ikan diatas kapal belum berorientasi pada jaminan mutu.
11. Terdapatnya dermaga tangkahan disekitar pelabuhan perikanan.
12. Belum optimalnya dukungan perbankan/lembaga keuangan non bank dalam permodalan nelayan.

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI PPS BITUNG

Visi PPS Bitung tahun 2020-2024 adalah **Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”** di PPS Bitung.

B. MISI PPS BITUNG

PPS Bitung melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi PPS Bitung

C. TUJUAN PPS BITUNG

Menjabarkan misi PPS Bitung, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya

perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.

3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan *harvest strategy*, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep *eco-fishingport*.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup PPS Bitung**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi PPS Bitung yang berkualitas, mencakup profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

D. SASARAN STRATEGIS PPS BITUNG

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Mengacu pada *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2020, terdapat 6 (enam) sasaran program dan 15 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Program “Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja **Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)**.
2. Sasaran Program “Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja **Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)**.
3. Sasaran Program “Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja **Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (Unit)**.

4. Sasaran Program “Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (%).**
 - b. **Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP).**
5. Sasaran Program “Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (ton).**
 - b. **Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (dokumen).**
 - c. **Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai).**
 - d. **Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang).**
 - e. **Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (lokasi).**
 - f. **Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%).**
6. Sasaran Program “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai).**
 - b. **IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (indeks).**
 - c. **Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai).**
 - d. **Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai).**

Pada Tahun 2022, terdapat 10 (sepuluh) sasaran program dan 20 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Program “Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)**
2. Sasaran Program “Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang akurat” dengan indikator kinerja : **Rata-rata volume produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)**
3. Sasaran Program “Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang

berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja:

Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)

4. Sasaran Program “Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang)**
 - b. **Jumlah awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)**
5. Sasaran Program “ Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (unit).**
6. Sasaran Program “ Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berwawasan lingkungan (Lembaga).**
7. Sasaran Program “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berdaya saing” dengan indikator kinerja : **Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen).**
8. Sasaran Program “Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang).**
9. Sasaran Program “Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Lembaga Pengelola Perikanan WPP 716 yang operasional (Lembaga).**
 - b. **Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi(Laporan).**
10. Sasaran Program “Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - b. **Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)**
 - c. **Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - d. **IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)**
 - e. **Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan**

Perikanan Samudera Bitung (Persen)

- f. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
- g. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
- h. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
- i. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)**

Pada Tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) sasaran program dan 20 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Program “ Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)**
2. Sasaran Program “ Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkatkan” dengan indikator kinerja : **Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)**
3. Sasaran Program “ Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja: **Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)**
4. Sasaran Program “Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - c. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)**
 - d. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)**
5. Sasaran Program “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal” dengan indikator kinerja :
 - a. Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)**
 - b. Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang dikembangkan (Unit)**
6. Sasaran Program “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berdaya Saing” dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - b. Pelabuhan Perikanan yang Dikelola dan Dianalisis Pendataannya (Lembaga)**
7. Sasaran Program “Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan

Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang).**

8. Sasaran Program “Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja:
 - c. **Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 716 yang operasional (Lembaga).**
 - d. **Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan).**
9. Sasaran Program “Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - b. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - c. **Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - d. **IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)**
 - e. **Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - f. **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - g. **Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - h. **Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**

Pada Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) sasaran program dan 18 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Program “ Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)**
2. Sasaran Program “ Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkatkan” dengan indikator kinerja : **Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)**
3. Sasaran Program “ Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Berdaya Saing” dengan indikator kinerja:
 - a. **Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - b. **Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - c. **Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**

4. Sasaran Program “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optional” dengan indikator kinerja :
 - a. **Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)**
 - b. **Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan (Nilai)**
5. Sasaran Program “Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)
6. Sasaran Program “Penngelolaan Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)**
7. Sasaran Program “Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - b. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - c. **Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - d. **Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)**
 - e. **Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - f. **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - g. **Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - h. **Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - i. **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KKP

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (DJPT)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. (DJPDS, BKIPM)
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPRL, DJPSDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM)

Untuk mencapai 5 arah kebijakan diatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;

- 2) Penguatan Unit Pelayanan Teknis Perikanan Tangkap.
- b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
 - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
- c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
 - 2) Pengembangan Lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
 - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
 - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs).
- d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.
- e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project*) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
 - 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
 - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias
 - e. Pengembangan budidaya rumput laut
 - f. Pengembangan pakan mandiri
 - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
 - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
 - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
 - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
 - l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
 - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
 - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
 - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
 - q. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Startegi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
 - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
 - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
 - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
 - f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
 - g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
 - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
 - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan

- j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
 - k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
 - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
 - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
 - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
 - o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
 - p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
 - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
 - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
 - s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
 - t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
 - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
 - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
 - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
 - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan
 - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
 - bb. Penguatan UPT
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
 - c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
 - d. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - e. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
 - f. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
 - g. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
 - h. Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana

aksi pengelolaan

- i. Pengelolaan Biofarmakologi
 - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - k. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - l. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - m. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - n. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
 - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - p. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
 - q. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - r. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - s. Penyadaran masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - t. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - u. Harmonisasi Sistem Pengkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
 - v. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
 - w. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
 - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
 - c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
 - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
 - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri

- f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
 - i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Indeks SPBE
 - c. Level maturitas SPIP
 - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
 - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut

termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayanskala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk

memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPS BITUNG

Arah kebijakan dan Strategi PPS Bitung merupakan penurunan arah kebijakan dan Strategi DJPT yang diterjemahkan ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.

1. Kebijakan Pokok

a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara

bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata Kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat

- bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
 - d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
 - e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
 - f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
 - g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
 - h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sector terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas

“Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk di dalamnya

menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP. Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar- daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan.

4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan

dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan e-services;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan

5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih

memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungannya yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam. Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi

nelayan; dan

- f) Penguatan informasi kenelayan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

c. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Financial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*. Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

2. Kebijakan Pengarusutamaan

a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook, e-services perizinan, e-layar, dll*).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. PPS Bitung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak membuat kerangka regulasi karena fungsinya sebagai pelaksana regulasi sehingga regulasi yang diterapkan di PPS Bitung mengacu kepada kerangka regulasi KKP dan DJPT.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

PPS Bitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Tugas yang diemban PPS Bitung adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPS Bitung

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi PPS Bitung terdiri atas Kepala PPS Bitung, Kasubbag Umum dan Kelompok Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;

- d. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- e. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- f. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- g. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- h. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- i. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha.

Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran terdiri dari :

- a. Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
- b. Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
- c. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha. Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha terdiri dari:

Seksi Tata Kelola Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan.

Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum;
- c. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan pengendalian lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), pengelolaan Barang Milik Negara, rumah tangga, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (*Output*). Indikator Kinerja Kegiatan di PPS Bitung periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1 Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	25	50	75	100	125
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	2 Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)	1.128	1.163	1.203	1.218	1.284
3	Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	3 Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (Unit)	598	628	659	692	727
4	Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	4 Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (%)	100	100	100	100	100
		5 Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	1	1	1	1	1
5	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	6 Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (ton)	43.461	47.807	52.587	57.846	63.631
		7 Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (dokumen)	1	1	1	1	1
		8 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	80	81	82	83	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		9	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	50	105	130	155	185
		10	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (lokasi)	1	1	1	1	1
		11	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	100	100	100	100	100
6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	75,07	86	87	88	90
		13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (indeks)	72	73	74	75	76
		14	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	85	85	86	87	88
		15	Nilai IKPA lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)

Tabel 2. Revisi Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2020-2024 (2021)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)	25	30	75	100	125
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	2	Nilai PNBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)	1.128	1.163	1.203	1.218	1.284
3	Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan	3	Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 716 (dokumen)	1	1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Perikanan Samudera Bitung	4	Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (laporan)	N/A	80	100	120	150
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (ton)	43.461	45.000	47.000	50.000	53.000
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	6	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1	1	1	1	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berdaya saing dan berkelanjutan	7	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	80	81	82	83	84
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	8	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	50	60	130	155	185
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	9	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	N/A	75	76	77	78
9	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (indeks)	72	73	74	75	76
		11	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	75,07	75,07	75,07	75,07	75,07
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	85	85,15	86	87	88
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	N/A	72,5	72,5	72,5	72,5
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	N/A	72,5	72,5	72,5	72,5
		15	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	N/A	86	86	86	86
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)

Tabel 3. Revisi Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2020-2024 (2022)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Juta)	1.128	1.163	1.257	3.264	3.296
2	Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	2	Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)	N/A	N/A	3.833	4.000	4.666
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	3	Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	N/A	N/A	50	70	90
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	4	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya (Orang)	N/A	N/A	30	40	50
		5	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)	N/A	N/A	30	40	50
5	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	6	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (Unit)	N/A	N/A	1	1	1
6	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	7	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berwawasan lingkungan (Lembaga)	1	1	1	1	1
7	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berdaya saing	8	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	80	81	82	83	84
8	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	9	Jumlah nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	25	30	48	50	52

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
9	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Lembaga Pengelola Perikanan WPP 716 yang operasional (Lembaga)	1	1	1	1	1
		11	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	N/A	80	180	270	360
10	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	12	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	75,07	75,07	75,07	75,07	75,07
		13	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	N/A	N/A	100	100	100
		14	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	85	85,15	80,01	81	82
		15	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	72	73	79	79	79
		16	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	N/A	N/A	75	75	75
		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	N/A	72,5	75	75	75
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	N/A	72,5	75	75	75
		19	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)
		20	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	N/A	86	81	82	83

Tabel 4. Revisi Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2020-2024 (2023)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Juta)	1.128	1.163	1.257	3.264	3.296

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)	43.461	45.000	N/A	47.000	48.000
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	N/A	N/A	50	100	110
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	4	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya (Orang)	N/A	N/A	30	50	70
		5	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	N/A	N/A	N/A	1	1
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	6	Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	N/A	N/A	1	1	1
		7	Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang Dikembangkan (Unit)	1	1	1	1	1
7	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berdaya saing	8	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	80	81	82	83	84
		9	Pelabuhan Perikanan yang Dikelola dan Dianalisis Pendataannya (Lembaga)	N/A	N/A	N/A	3	3
8	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	25	30	48	50	52
9	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	11	Lembaga Pengelola Perikanan WPP 716 yang operasional (Lembaga)	1	1	1	1	1
		12	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	N/A	80	180	200	250
10	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	13	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	75,07	75,07	75,07	75,07	75,07
		14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan	N/A	N/A	N/A	75	76

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Samudera Bitung (Persen)					
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	N/A	N/A	N/A	93	93,2
		16	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	72	73	79	81,35	81,5
		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	N/A	72,5	75	77,5	80
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	N/A	72,5	75	77,5	80
		19	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (90)
		20	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	N/A	86	81	82	83

Tabel 5. Revisi Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2020-2024 (2024)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Juta)	1.128	1.163	1.257	3.264	3.353
2	Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkatkan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)	43.461	45.000	N/A	47.000	48.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berdaya saing	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	N/A	N/A	N/A	100	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	80	81	82	83	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	N/A	N/A	N/A	95	96

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	N/A	N/A	N/A	60	50
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	N/A	N/A	N/A	30,01	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	N/A	N/A	50	100	670
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	9	Persentase Peningkatan pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	N/A	N/A	N/A	25	30
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	75,07	75,07	75,07	75,07	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	N/A	N/A	N/A	75	80
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	N/A	N/A	N/A	93	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	72	73	79	81,35	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	N/A	72,5	75	77,5	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	N/A	72,5	75	77,5	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (93,75)	Baik (93,76)
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	N/A	86	81	82	86
		18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	N/A	N/A	N/A	88,21	88,30

B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Dalam mencapai sasaran strategis, pada tahun 2020-2024 PPS Bitung melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan melaksanakan 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
5. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Secara terinci kerangka pendanaan di PPS Bitung tahun 2020-2024 menurut program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 1**.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) PPS Bitung Tahun 2020 – 2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PPS Bitung, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra PPS Bitung Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPS Bitung. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program PPS Bitung jugadihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran, berbagai sektor terkait lainnya, dan stakeholders perikanan tangkap. Kerja keras dari seluruh jajaran PPS Bitung dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan PPS Bitung yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

Lampiran. Matriks Kerangka Pendanaan PPS Bitung

**KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG**

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)				
		2020*)	2021*)	2022*)	2023*)	2024*)	2020*)	2021*)	2022*)	2023*)	2024*)
PPS BITUNG							12,071	15,496	15,214	18,263	17,244
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP/PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN							12,071	5,033	3,971	4,837	2,706
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan							0,020	0,017	0,088	0,377	0,63
Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	Jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1 provinsi	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-
Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan/ Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan PKL dengan pelaku usaha	Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan/Jumlah awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan PKL dengan pelaku usaha	50 orang	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-
Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya	-	60 orang	30 orang	30 orang	70 orang	-	0,017	0,013	0,013	0,13
Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	-	-	50 produk	50 produk	100 produk	-	-	0,062	0,350	0,50
Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	Jumlah dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	-	-	-	1 produk	1 produk	-	-	0,013	0,014	-
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan							1,550	4,014	3,711	4,272	2,504
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera	1 lokasi	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera	100 persen	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-
Layanan sarana dan prasarana internal	Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup Direktorat Pelabuhan Perikanan	1 layanan	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
Layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan	Jumlah layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan	-	1 layanan	-	-	-	-	0,613	-	-	-
Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendaftaran Pembangunan SPDN yang dilaksanakan	Jumlah layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendaftaran Pembangunan SPDN yang dilaksanakan	-	1 layanan	-	-	-	-	0,004	-	-	-
Layanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) yang dilaksanakan	Jumlah layanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) yang dilaksanakan	-	1 layanan	-	-	-	-	0,044	-	-	-
Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar	-	1 lembaga	-	-	-	-	0,574	-	-	-
Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya	-	1 lokasi	-	-	-	-	2,780	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan fasilitas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan fasilitas	-	-	-	-	1 rekom. kebijakan	-	-	-	-	0,15

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)				
		2020*)	2021*)	2022*)	2023*)	2024*)	2020*)	2021*)	2022*)	2023*)	2024*)
Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	-	-	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	-	-	1,769	2,259	2,086
Pelabuhan Perikanan lokasi pelaksanaan PNBP perikanan tangkap yang terkelola pendataannya	Jumlah Pelabuhan Perikanan lokasi pelaksanaan PNBP perikanan tangkap yang terkelola pendataannya	-	-	1 lembaga	-	-	-	-	0,224	-	-
Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya, termasuk untuk menunjang PNBP perikanan tangkap	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya, termasuk untuk menunjang PNBP perikanan tangkap	-	-	1 lokasi	-	-	-	-	0,624	-	-
Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan	Jumlah Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan	-	-	1 lokasi	1 unit	1 unit	-	-	1,094	0,5	-
Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	-	-	-	3 lembaga	3 lembaga	-	-	-	0,512	-
Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya, termasuk untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya, termasuk untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	1,001	-
Sarana penunjang pemungutan PNB Perikanan Tangkap yang disediakan	Jumlah Sarana penunjang pemungutan PNB Perikanan Tangkap yang disediakan	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	0,07
Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	Jumlah Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	0,198
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan							0,023	0,031	0,006	0,008	0,008
Sistem Perizinan Pusat-Daerah yang terintegrasi	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah	1 provinsi	1 daerah	-	-	-	0,015	0,025	-	-	-
Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	60 orang	-	-	-	-	0,008	-	-	-	-
Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	-	120 orang	48 orang	40 orang	60 orang	-	0,006	0,006	0,008	0,008
Pengelolaan Sumber Daya Ikan							0,055	0,973	0,166	0,181	0,131
Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	Jumlah Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	80 unit	80 laporan	180 laporan	180 laporan	230 laporan	0,025	0,212	0,033	0,0328	0,047
Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang operasional	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang operasional	1 WPP	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	0,03	0,760	0,133	0,148	0,084
Program Dukungan Manajemen								10,462	11,243	13,426	14,538
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPT/Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPT							10,423	10,462	11,243	13,426	14,538
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	25 layanan	-	-	-	-	0,610	-	-	-	-
Layanan Perkantoran	Pemenuhan layanan perkantoran DJPT	1 layanan	2 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	9,81	9,951	10,778	12,232	12,776

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)				
		2020*)	2021*)	2022*)	2023*)	2024*)	2020*)	2021*)	2022*)	2023*)	2024*)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Jumlah layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	-	0,085	0,090	0,084	0,084
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Jumlah layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	-	0,035	0,05	0,05	0,05
Layanan Data dan Informasi	Jumlah layanan Data dan Informasi	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	-	0,015	0,019	0,02	0,02
Pemantauan dan evaluasi serta Pelaporan	Jumlah Pemantauan dan evaluasi serta Pelaporan	-	1 layanan	1 dokumen	1 layanan	1 layanan	-	0,377	0,047	0,047	0,047
Layanan Manajemen SDM	Jumlah Layanan Manajemen SDM	-	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	-	-	0,095	0,095	0,100
Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah layanan manajemen keuangan	-	-	1 dokumen	1 layanan	1 layanan	-	-	0,164	0,173	0,173
Perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	0,225	0,366
Layanan sarana internal	Jumlah layanan manajemen keuangan	-	-	-	1 layanan	1 layanan	-	-	-	0,2	0,457
Layanan Prasarana Internal	Jumlah dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	-	-	-	1 layanan	1 layanan	-	-	-	0,3	0,465

Keterangan : *) data disesuaikan dengan dokumen RKAKL